

# **PERAN ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN**

Nizar Galang Harfianto, Eldiana, Mar'atus Solekah

Nizar.galang22@gmail.com

Universitas Negeri Semarang

## **Abstrak**

Kesadaran pendidikan akan peningkatan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dan perubahan. Dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tersebut tentunya ada aspek yang melatarbelakangi hal tersebut seperti program profesionalisasi guru atau PPG melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK, PPPG, LPMP, Dinas Pendidikan dan Perguruan tinggi yang mempunyai historial akan pendidikan keguruan seperti IKIP. Dalam hal peningkatan kualitas guru organisasi profesi kependidikan memprakarsai terjadinya program tersebut, karena dirasa hal ini lah yang menjadi awal dari meningkatnya mutu pendidikan. Tidak hanya profesionalisasi guru saja namun juga meliputi pendidikan karakter yang dimulai sejak dini, melalui PAUD oleh organisasi HIMPAUDI.

**Kata Kunci :** Sistem, Organisasi Pendidikan, Mutu, Pendidikan karakter

## **Pendahuluan**

Pendidikan secara sederhana adalah “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan” H. Fuad Ihsan, (2005: 1). Sedangkan pendidikan indonesia memiliki tujuan nasional yaitu pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk mencapai hal tersebut maka salah satunya adalah dengan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Tujuan Pendidikan Nasional.

Perkembangan di dunia pendidikan tidak lepas dari peran seorang pendidik atau bisa disebut guru. Guru merupakan pahlawan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik atau pembelajar. Seorang pendidik memiliki sifat rasional dalam berkarya, mengutamakan efisiensi, menuntut disiplin ilmu sosial dan kemampuan kerja sama atau berorientasi dengan kesenjangan yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan. Mengingat kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang berkualitas maka perlu juga disiapkan guru yang memiliki kemampuan profesional dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam upaya peningkatan kualitas guru tersebut memerlukan campur tangan pihak yang berwenang dan berkompentensi dalam bidang tersebut. Salah satu pihak yang berwenang dalam peningkatan tersebut adalah organisasi profesi kependidikan berperan cukup penting baik dalam hal peningkatan kualitas guru maupun pengembangan mutu pada pendidikan yang berlaku di Indonesia. Sebelum membahas mengenai organisasi profesi kependidikan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai organisasi dan profesi itu sendiri. Dikurip dari buku Acmad Sobirin (2007: 5-7) mengenai pengertian organisasi sendiri, diantaranya dari pendapat Stephen Robbins: “Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relative lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan oleh manusia yang beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Kemudian dari pendapat beberapa ahli mengenai pengertian organisasi juga dapat ditemukan dalam tulisan Sutarto (2006: 23-35), seperti pendapat William Schulze: “Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. James G. March: “Organisasi adalah himpunan-himpunan yang saling memengaruhi manusia dan mereka merupakan himpunan-himpunan paling luas di dalam masyarakat kita yang memiliki sesuatu yang sama dalam sistem koordinasi”. Michael J. Jucius: “Istilah organisasi disini dipakai untuk menunjukan pada suatu kelompok orang yang bekerja dalam hubungan yang saling bergantung kearah tujuan atau tujuan-tujuan bersama”. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan kumpulan manusia lebih antar dua atau lebih yang didalamnya terdapat susunan dan aturan serta sistem aktivitas pembagian kerja untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya mengenai profesi yang dapat dimaknai sebagai “pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperolehnya melalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau

juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri” Kanter (2011). Kemudian ada pendapat lain dari Hidayat Nur Wahid dalam *Economics, Bussines, Accounting Review*, edisi II/ April 2006: mengatakan bahwa profesi merupakan sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Sedangkan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideology, pemikiran, gairah untuk terus menerus secara dewasa, secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai aktivitas kegiatan pokok untuk menghasilkan kebutuhan hidup dengan mengandalkan atau memanfaatkan kemampuan dan keahlian dibidang kerja. Adapun karakteristik profesi antara lain adalah mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu), dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Dari berbagai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi profesi kependidikan adalah suatu pihak yang memiliki peran dan keterlibatan dalam meningkatkan profesionalisme guru, dan peningkatan mutu kualitas sistem pendidikan yang sedang berjalan dengan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan Standar Nasional Pendidikan.

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Pendidikan

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan adalah metode pendekatan sistematis. Melalui pendekatan sistematis, kita dapat melihat semua aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti metode, strategi. Dalam bahasa Inggris, *system* berarti sistem, susunan, jaringan, dan metode. Sistem juga diartikan sebagai strategi, cara berpikir atau model berpikir. Sebagai suatu kesatuan yang hidup, sistem secara sadar telah merancang komponen-komponen yang berkaitan dengan estimasi fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada fungsi dan tujuan Pendidikan dapat dikemukakan unsur-unsur penting dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem merupakan kesatuan kegiatan antara alat dan tujuan, yang sangat penting untuk mencapai tujuan nasional. Satuan pendidikan sebagai alat dan kegiatan dapat berupa sekolah, kursus, kelompok belajar, dan sebagainya.
- Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem bersifat universal, komprehensif, dan terintegrasi. Semesta artinya terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia dan berlaku untuk seluruh Indonesia. UUSPN menetapkan bahwa setiap 62 warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Secara komprehensif mencakup semua saluran pendidikan, tingkat dan jenis. Integrasi berarti keterkaitan antara sistem pendidikan dan upaya pembangunan semua negara.
- Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem harus dipandang sebagai keseluruhan unsur dan kegiatan pendidikan, yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. UUSPN No. 20 Tahun 2003 mengatur: Sistem pendidikan nasional adalah semua komponen pendidikan yang saling berhubungan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan adalah suatu bentuk interaktif yang menyeluruh dari sekumpulan unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara komprehensif.

Sistem pendidikan merupakan suatu bentuk kumpulan unsur-unsur pendidikan yang saling berinteraksi secara utuh, unsur-unsur tersebut bekerja sama secara utuh dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah seperangkat konsep atau prinsip pendidikan yang saling berhubungan dan terpadu.

### **Organisasi Profesi Kependidikan**

Organisasi adalah suatu kesatuan manusia antara dua orang atau lebih, yang didalamnya terdapat pengaturan dan aturan serta sistem kegiatan kerja untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selain itu, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan utama mencari nafkah dan mengandalkan keterampilan. Ciri-ciri profesi ini antara lain mengandalkan keahlian atau keahlian khusus untuk dilakukan sebagai pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu), dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi profesi kependidikan merupakan suatu kelompok yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan bersatu dalam

satu payung demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dalam tempat yang mereka tempati.

Adapun berbagai organisasi guru yang ada di Indonesia antara lain:

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal Organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan guru Indonesia (PGI) tahun 1932.

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas.

3. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi anggotanya.

4. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi Kependidikan ini bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing.

## **B. Peran Organisasi Profesi Kependidikan dalam sistem pendidikan**

Organisasi profesi kependidikan memiliki suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis, dimana akan menolak komponen sistem yang tidak searah atau sejalur dalam praktek keorganisasiannya, seperti anggota yang mencoba melanggar peraturan, Maka dari itu dalam suatu organisasi terdapat aturan yang berlaku dan bersifat mengikat para anggotanya. Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesionalitas tidak terlepas dari perkembangan berbagai jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi tersebut

pada dasarnya dapat terbentuk atas Prakarsa para pengembangan di bidang pekerjaan tadi, (Saud:2007). Organisasi profesi mempunyai 2 perhatian utama yaitu, kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari anggota profesi yang tidak dipersiapkan dengan baik dan kurangnya standar dalam bidang profesi yang dijalani. Namun disini difokuskan pada organisasi profesi dalam bidang kependidikan seperti PGRI, IGI, dan lain-lain. Organisasi profesi kependidikan memiliki banyak peran dalam sistem pendidikan, seperti halnya meningkatkan kualitas mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya, memberikan laanan pada masyaraat pengguna jasa dalam membina kehidupan. Dengan demikian keragaman bentuk corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu bervariasi dimana disini organisasi keprofesian bersifat asosiasi sedangkan sifatnya berbentuk federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotan cukup terbatas dari pucuk organisas yang berserikat. Suatu profesi dibidang pendidikan, khususnya yang termasuk sebagai kategori guru atau pengajar pada dasarnya memperoleh pengakuan (*recognition*) sebagai kategori profesi dan menerima imbalan dari lembaga pendidikan yang berlaku. Kontribusi organisasi profesi kependidikan dalam meningkatkan kompetensi guru adapat dilihat dari pengadaan program (PPG) dimana ini merupakan program untuk memberdayakan guru serta meningkatkan profesionlaitas guru dalam melakukan dan menerapkan program pendidikan terhadap proses pembelajaran yang berjalan, tentunya hal ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kualitas mutu pendidikan secara umum ditentukan oleh beberapa faktor atau elemen pendukung, diantaranya elemen instruktur atau pendidik, materi ajar, metode , tujuan pendidikan, (Ari Hidayat & Imam Mahali, 2012).

Guru merupakan komponen yang paling riskan atau berpengaruh dalam menentukan pendidikan secara keseluruhan terutama berkaitan dengan peroses belajar mengajar. Dimana tugas seorang guru tidak hanya sekedar transfer ilmu kepada peserta didiknya namun juga kewajibannya memberuk karakter melalui ideologi Pancasila dan pendidikan religious atau keagamaan. Berbagai upaya profesionalisasi guru telah dilakukan namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain pada lembaga pencetak guru. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 14 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit menyebutkan bahwa lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk LPTK dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Universitas (eks Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP)), dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP,

yang keberadaannya di bawah universitas). Dasar pemikiran penyelenggaraan pendidikan keguruan dalam perkembangannya lebih difokuskan pada masalah kualitas atau kompetensi yang selama ini menjadi rujukan atau acuan setiap satuan pendidikan. LPTK belum memiliki standar untuk mengukur kualitasnya, sehingga menghasilkan lulusan yang kualitasnya beragam Juangsih (2014: 75). Nurdin (2005: 23) berpendapat, bahwa upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurang-kurangnya melibatkan empat faktor, yaitu: ketersediaan dan mutu calon guru, pendidikan prajabatan, mekanisme pembinaan dalam jabatan, serta peranan organisasi profesi. Mulyasa (2006: 35) juga sependapat, bahwa peningkatan mutu pendidik melalui pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan dan akta mengajar. Indikator kualifikasi menjadi prioritas utama dalam mempersiapkan uji kompetensi atau profesionalisasi guru pada semua jenjang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang dilibatkan dalam peningkatan mutu guru antara lain PPPG, LPMP, Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan juga telah didukung oleh perangkat hukum yaitu Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut ternyata belum mampu menjangkau peningkatan mutu guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan secara menyeluruh. Guru dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan keprofesian secara berkelanjutan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru adalah kegiatan yang mengarah pada seluruh pembelajaran formal dan informal yang mampu meningkatkan guru melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menngkatkan kualitas pendidikan.

Adapun peran ataupun fungsi dari organisasi profesi kependidikan/keguruan,

1. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dan memberikan masukan-masukan pada pemeritah dalam Menyusun perencanaan pendidikan, hal ini dikarenakan pihak yang menjadi anggota organisasi juga terdapat guru sehingga langsung mengetahui bentuk kondisi dan situasi lapangan program pendidikan yang sedang berjalan.
2. Sebagai pihak yang mendukung (*supporting agency*) pada poin ini bersifat pemikiran artinya tenaga ahli kependidikan dalam penyelennnggaraa, pembinaan, dan pengembangan pendidikan, dimana disini organisasi memberikan dukungan penuh dalam melayani keluhan atau permasalahan yang terkait.

3. Mengkritisi dan mengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar,
4. Sebagai mediator (*communicating agency*) antara guru dengan pemerintah (Dinas Pendidikan) dan Stakeholders, artinya pihak yang memberikan jalan atau menghubungkan guru dalam menyampaikan pesannya.

Salah satu persoalan yang sering disinggung yakni kemampuan bangsa dalam menghadapi masa depan, disini bukan hanya mutu pendidikan yang disiapkan namun juga pada kualitas karakter dari peserta didik atau generasi itu sendiri. Terjadinya krisis moralitas bisa menjadi penyebab runtuhnya etika fundamental bangsa, sehingga di khawatirkan pada masa yang akan datang ketika generasi ini mendapat giliran sebagai pemimpin bangsa tidak mampu memberikan sikap atau moralitas yang baik dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Maka dari itu perlunya pendidikan karakter sejak dini atau PAUD untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan tersebut dimasa depan. HIMPAUDI berperan penting dalam hal ini yaitu menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. berperan menjadi panutan, pembimbing, pengasuh dan fasilitator bagi anak usia dini. Pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik (guru). Sedangkan tenaga kependidikan adalah pengelola, pemerhati, pakar, praktisi dan masyarakat umum lainnya yang melaksanakan program PAUD. Dalam pendidikan karakter terhadap anak usia dini HIMPAUDI berperan dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat, kemudian melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi sevata berjenjang, menampung memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, hingga memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

## Kesimpulan

Peran organisasi profesi kependidikan disini tidak hanya berfokus pada peningkatan profesionalitas guru, kualitas mutus pendidikan melainkan juga dalam mengembangkan pendidikan karakter yang dimulai dari anak usia dini. Pengembangan atau profesionalisasi guru melalui kegiatan PPG, PPL dimana lembaga yang terlibat didalamnya adalah LPTK dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Universitas (eks Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP)), dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP, yang keberadaannya di bawah universitas). Lembaga-lembaga pendidikan yang dilibatkan dalam peningkatan mutu



guru antara lain PPPG, LPMP, Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan juga telah didukung oleh perangkat hukum yaitu Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk pendidikan karkater sejak dini melalui pendidikan PAUD oleh HIMPUSAUDI berperan dalam mensosialisasikan pentiingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat, kemudian melakukan pembinaan da pengembangan organisasi sevata berjenjang, menampung memerjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, hingga memfasilitasi pengembnagan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

### Daftar Pustaka

- (Effendhie, 2011; Fitriyani, 2019; Ii, n.d.; Ii & Teori, n.d.; Komariah et al., 2020; Masruri, Kuntoro, & Arikunto, 2016; *Mini Riset Profesi Kependidikan*, 2017; Mulvey, 1984; Nurkholis, 2013; Pengaruh PMA, PMDN, TK, 2020; Prakoso & Semarang, 2021; prayoga, 2019; Rusdarti, Slamet, & Prajanti, 2019; Seminar, Dengan, & Barat, 2008; Seminar et al., 2008; Sutapa, 2002; Tedjawati, 2011)Anggara, R., & Chotimah, U. (2012). Penerapan Lesson Study Berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PKn SMP Se-Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Forum Sosial*, 5(2), 188–197. Retrieved from [http://eprints.unsri.ac.id/1421/%5Cnhttp://eprints.unsri.ac.id/1421/1/Penerapan\\_Lesson\\_Study\\_berbasis\\_MGMP\\_PKn.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/1421/%5Cnhttp://eprints.unsri.ac.id/1421/1/Penerapan_Lesson_Study_berbasis_MGMP_PKn.pdf)
- Anwar, R., Guru, P., & Guru, K. M. (2011). Kata Kunci: MGMP, Profesionalisme Guru, Kinerja Mengajar Guru. *Jurnal MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALISME*, 13(1), 3. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6393/4350>
- Ariani, D. (2017). Aktualisasi Profesi Teknologi Pendidikan di Indonesia. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/ijcets.v5i1.14244>
- Effendhie, M. (2011). Pengantar Organisasi. *Organiasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan*, 1–90. Retrieved from <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>
- Fitriyani, F. (2019). Konsep Organisasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Sekolah. *EL-Ghiroh*,

17(02), 61–80. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.105>

Ii, B. A. B. (n.d.). *Tohari Musnamar*,. 24–67.

Ii, B. A. B., & Teori, L. (n.d.). *Tinjauan konsep dasar profesionalisme*. 45–46.

Indonesia, D. I. (2013). Dinamika Organisasi Profesional Kependidikan Di Indonesia. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 42(1).

Koerniantono, M. E. K. (2019). Pendidikan Sebagai Suatu Sistem. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(1), 59–70. Retrieved from <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/69>

Komariah, A., Suryana, A., Kendari, U. M., Indonesia, U. P., In, R., Teacher, I., & Education, P. (2020). Kesiapan Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (Ppg) Di Universitas Muhammadiyah Kendari. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(2), 336–348. <https://doi.org/10.17509/jap.v27i2.29297>

Kristanto, A. (2016). Aplikasi teknologi pendidikan di sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4, 13–16.

Masruri, A., Kuntoro, S. A., & Arikunto, S. (2016). Pengembangan Kompetensi Dan Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan Ptain: Studi Kasus Di Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i1.9818>

*Mini Riset Profesi Kependidikan*. (2017). (4142121023).

Mulvey, C. (1984). Wage Policy and Wage Determination in 1983. *Journal of Industrial Relations*, 26(1), 112–119. <https://doi.org/10.1177/002218568402600108>

Naway, F. A. (2017). Komunikasi dan Organisasi Pendidikan. In *Gorontalo: Ideas Publishing*. Retrieved from <https://repository.ung.ac.id/get/kms/15711/komunikasi-dan-organisasi-pendidikan.pdf>

Nurdyansyah. (2017). Sumber Daya dalam Teknologi Pendidikan. *Universitas Negeri Surabaya*, 1–22.

Nurkholis. (2013). *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. 1(1), 24–44.

- Pengaruh PMA, PMDN, TK, dan I. (2020). *No Title*. 2507(February), 1–9.
- Prakoso, B. A., & Semarang, U. N. (2021). *Artikel profesi organisasi kependidikan*. (December).
- prayoga, M. denny. (2019). *Definisi Dan Fungsi Organisasi Profesi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fs85x>
- Rapcewicz, Z. P. P. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *URTI - From Quantum Mechanics to Technology*, 1–23. Retrieved from <https://link-springer-com.proxy.libraries.uc.edu/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-19199-2.pdf>
- Rusdarti, R., Slamet, A., & Prajanti, S. D. W. (2019). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Pembuatan Publikasi Ilmiah Melalui Workshop Dan Pendampingan Bagi Guru Sma Kota Semarang. *Rekayasa*, 16(2), 271–280. <https://doi.org/10.15294/rekayasa.v16i2.17562>
- Seminar, D. P., Dengan, B. S., & Barat, B. (2008). *Peran organisasi profesi dalam peningkatan kualitas kompetensi guru pendidikan dasar*. 1–35.
- Sutapa, M. (2002). Organisasi Pendidikan. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–96.
- Tedjawati, J. (2011). Peran HIMPAUDI Dalam Pengembangan PAUD. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(1), 123. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i1.12>
- (Anggara & Chotimah, 2012; Anwar, Guru, & Guru, 2011; Ariani, 2017; Indonesia, 2013; Koerniantono, 2019; Kristanto, 2016; Naway, 2017; Nurdyansyah, 2017; Rapcewicz, 2016)
- Hidayanto, N. E. (2017). PERAN IGTKI DALAM MENDORONG MASYARAKAT UNTUK MENYEKOLAHKAN ANAKNYA. *Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum*, 1(1), 11-14.
- Islamudin, A. (2019). STUDI TENTANG PERAN ORGANISASI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PASCA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Simki Pedagogia*, 3(5), 44-50.
- Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia. (2016). Tentang IPTPI. Diunduh dari [www.Iptpi.org/](http://www.Iptpi.org/)

Mudhofir, A. (2012). Pendidik profesional: konsep, strategi, dan aplikasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Murwaningsih, T. (2004). PERANAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU. *Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif*, 8(01).

Tilaar, H. A. R. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rincka Cipta

Tim PGRI Pusat. (2007). *Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan Untuk Perubahan Mental Bangsa*. Buku Kompas.